



Buletin Parlamentaria

Nomor 1050/IV/IV/2019 • April 2019



DPR Undang Parlemen Asing Saksikan Pemilu



9 772614 339005

Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya
Independensi Lembaga Perwakilan

Hlm. 4

KTP-el Jadi Acuan
Penetapan DPT

Hlm. 6

DPR RI mengundang anggota parlemen negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Tanah Air. Ini bagian dari upaya DPR RI dalam memperlihatkan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Apalagi pada Pemilu kali ini menghadirkan sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, undangan ini diinisiasi DPR RI dan baru pertama kali dilakukan. Kegiatan ini bagian dari upaya untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Undangan yang hadir di antaranya Parlemen Turki, Malaysia, Pakistan, Rusia, dan dua organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam dan *Westminster Foudation for Democracy (WFD)*, Inggris.

"Ini adalah inisiatif DPR untuk mengundang sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara sahabat sekaligus organisasi internasional yang selama ini dekat dan bekerja sama dengan DPR. Ini adalah Pemilu serentak pertama yang kita laksanakan, baik Pilpres maupun Pileg," ucap Fadli usai memberi sambutan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* bertajuk *Election Visit Indonesia 2019*, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Beberapa negara lain tidak ikut hadir dalam undangan tersebut seperti Parlemen Amerika dan Australia. Para undangan dan *observer* dari negara asing yang diundang ini kemudian akan memantau ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Jabodetabek. TPS itulah para undangan melihat dari dekat bagaimana masyarakat di Tanah Air melakukan pemungutan suara dan proses penghitungannya.

"Kita ingin menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agenda politik



Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama delegasi parlemen dunia dan organisasi internasional. Foto: Geraldjijik

DPR Undang Parlemen Asing Saksikan Pemilu

nasional yang cukup unik. DPR baru pertama kali mengundang. Biasanya yang mengambil inisiatif KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tapi di negara-negara lain juga parlemennya biasa mengundang bila ada Pemilu," terang politisi Partai Gerindra itu.

Turut hadir dalam FGD itu, para pembicara seperti Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Anggota DKPP Muhammad, dan akademisi UI Chusnul Mar'iyah. "Dengan adanya *observer* internasional, mereka bisa menyaksikan langsung prosesnya. Mereka juga bisa memberi masukan dan memantau. Kita berharap para penyelenggara pemilu bisa siap supaya tidak terjadi kecurangan," tutup Fadli.

Sejumlah delegasi yang direncanakan hadir diantaranya *Deputy Speaker of the House of Representative of Malaysia* Mr. Nga

Kor Ming; *Member of Parliament Malaysia* Mr. Hassan Abdul Karim; dan Mr. Klaus Ranga Julias Louis sebagai Sekretaris Delegasi Malaysia. Kemudian, *Member of the Senate of Pakistan* Mr. Muhammad Asad Ali Khan Junejo; *Member of Pakistan National Assembly* Mr. Muhammad Bashir Khan; serta *Member of Turkish Grand National Assembly* Mr. Adnan Gunnar.

Berikutnya, *PUIC Secretary General* Mr. Mouhamed Khourachi Niass; *PUIC Deputy Secretary General* Mr. Ali Ashgar Mohammadi Sijani; *Secretary of Executive Committee GOPAC* Mr. John Hyde; Anggota WFD Sir Simon Burns; dan Sekretariat Parlemen Rusia (DUMA) yang diwakili Mr. Anzhelika Butaeva dan Mr. Mikhail Davydov. Turut hadir Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. Abdul Salik Khan beserta jajarannya, dan sejumlah perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat untuk Indonesia.

■ mh/sf

Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Independensi Lembaga Perwakilan

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan, saat ini Tim Reformasi DPR RI sedang menyiapkan enam Undang-Undang (UU) baru untuk memperbaiki sistem kelembagaan dewan perwakilan. Dari enam UU itu, empat adalah pecahan dari UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Ia mengatakan, lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah lembaga-lembaga yang besar, sehingga sudah sepatutnya memiliki aturan sendiri.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, karena masih tergabungnya empat lembaga perwakilan tersebut dalam satu UU, sehingga cara membaca undang-undangnya pun sering tidak clear. Makanya sebaiknya dipisahkan, ada UU MPR, UU DPR, UU DPD, dan UU DPRD. Terlebih lagi di internal DPR RI, independensi Anggota Dewan masih sangat terikat dengan partainya.

"Kita mau mengatur keseluruhan konsep independensi lembaga perwakilan, sebab ini yang enggak ada. Harus jujur kita katakan, DPR tidak independen, karena sistem hubungannya dengan partainya sangat tidak independen," ungkap Fahri saat *Focus Group Discussion* (FGD) Peluncuran buku karya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, 'Kata Fadli: Catatan-Catatan Kritis dari Senayan', di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Fahri, Anggota DPR RI seharusnya setelah terpilih menjadi Anggota Dewan, maka hubungannya



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Ojijik

dengan partai politik harus menjadi lebih independen, karena ada suara rakyat pada dirinya. Independensi lembaga perwakilan ini akan dituangkan dalam undang-undang lembaga perwakilan, sehingga tidak saja orangnya tapi kewasannya juga independen.

"Betapa pentingnya DPR ke depan di-bikin merdeka, di-bikin lebih independen. Kami mengundang para ilmuwan untuk membicarakan konsep ini. Kita undang pakar-pakar, kita berikan drafnya, kita kasih gambaran *frame* besarnya. Inilah desain lembaga perwakilan kita yang sesuai dengan undang-undang dasar," papar legislator dapil NTB itu. ■eko/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, S.H., Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom. Rahayu Setyowati, Muhammad Husen Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Dewi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Singgih Rimbari Kinanti, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Arimbi Puspa Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha, Puntho Pranowo.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah Geraldin Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto, Safitri Restu Widyowati, SIP.

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E. Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Fadli Zon Luncurkan Buku “Kata Fadli: Catatan-Catatan Kritis dari Senayan”

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon meluncurkan sebuah buku yang berjudul “Kata Fadli: Catatan-Catatan Kritis dari Senayan”. Buku ini berisi tentang kumpulan dari ucapan-ucapan, rilis-rilis pers, kemudian komentar-komentar mengenai berbagai macam peristiwa dari hari ke hari selama 4,5 tahun dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sejak tahun 2014.

“Buku ini adalah kompilasi dari catatan-catatan saya selama 4,5 tahun menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, baik lisan maupun tertulis secara digital seperti *Whatsapp*. Hal ini perlu dikumpulkan, sebagai sebuah catatan dan bukti apa yang telah saya ucapkan secara substantif, tentang berbagai macam masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa kita,” ujar Fadli, ketika memberikan sambutan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) peluncuran buku terbarunya itu, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).

Dalam peluncuran buku tersebut, politisi Partai Gerindra itu juga menceritakan, dalam menanggapi berbagai macam isu ia selalu menggunakan data yang valid bukan asal-asalan. Seperti, persoalan buruh, ia dengan sigap menanggapi dengan data yang relevan terkait dengan buruh tersebut, begitu juga dengan isu lainnya.

“Bahkan, saya juga bertanya kepada kawan-kawan buruh sebelum mengeluarkan rilis pers atau pernyataan sikap. Begitu juga, dengan isu-isu lainnya baik isu ekonomi, politik



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerahkan buku berjudul “Kata Fadli: Catatan-catatan Kritis dari Senayan” kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: oji/k

budaya, sosial, pengaduan-pengaduan masyarakat dari daerah pemilihan saya di Bogor atau dari masyarakat dari seluruh Indonesia,” tandas Fadli.

Terus legislator dapil Jawa Barat V itu menegaskan bahwa bukunya fokus pada substansi dan pokok pikiran yang terlontar. Apalagi, mengingat dirinya adalah sosok legislator yang berada di seberang pemerintahan (oposisi), maka menurut Fadli, tentu suara kritisnya harus lebih kritis daripada yang lain.

“Tentu karena judulnya adalah catatan kritis, sebagai Anggota dan Pimpinan DPR, selain membuat Undang-Undang (UU) dan membuat anggaran bersama pemerintah, kami mempunyai tugas melakukan kontrol

terhadap jalannya pemerintahan, pelaksanaan terhadap UU dan lain-lain. Ini saya kira lebih kepada tugas untuk melakukan pengawasan dan ini yang saya pertanggungjawabkan dari apa yang sudah dilaksanakan,” pungkas Fadli.

Hadir dalam acara peluncuran buku tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah, Ahli Ekonomi Rizal Ramli, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Sejarawan dan Budayawan Ridwan Saidi, serta M. Tri Andika dari Universitas Bakrie sebagai moderator.

■ pun/sf

Penyelesaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga persiapan serta kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang akan berlangsung pada 17 April 2019 menjadi tema diskusi antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Gubernur Banten Wahidin Halim beserta jajarannya. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyampaikan, ke depan penetapan DPT akan mengacu pada data KTP-elektronik.

“Ke depan usulnya dengan era digital, semuanya bersumber pada data yang lebih valid, yaitu KTP-elektronik, sumbernya pada Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Dukcapil, karena data inilah yang digunakan untuk proses apapun,” ungkap Herman di sela-sela pertemuan yang digelar di Banten, baru-baru ini. Turut hadir, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, KPU dan Bawaslu Banten, dan Disdukcapil Banten.

Menurutnya kalau KPU punya data lain dengan yang dimiliki Kemendagri, ini akan menjadi aneh. “*Toh* semua sekarang sudah menginduk kepada data KTP elektronik yang ada di Kemendagri. Oleh karena itu, ke depan harus ada keputusan politik bahwa Data Pemilih Tetap itu mengacu pada data KTP-elektronik, ini menjamin usia 17 tahun atau yang sudah menikah,” papar Herman.

Ia juga mengungkapkan sampai saat ini masih ada ketidaksinkronan data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Kemendagri dengan DPT. Herman menegaskan ketidaksinkronan data ini harus diselesaikan. Oleh sebab itu, perekaman KTP-el penting bagi kepentingan masyarakat, sekaligus untuk membantu KPU untuk mendapatkan data lokasi tempat tinggal penduduk untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

“Gap antara wajib KTP-elektronik dengan percepatan untuk memenuhi wajib KTP-elektronik dengan DPT Provinsi Banten ini harus diselesaikan, jangan main-main. Ini ada sekitar 377 ribu gap antara wajib KTP-elektronik dengan DPT yang ditetapkan oleh KPUD Banten. Ini menurut saya persoalan harus segera dibersihkan, diselesaikan,” jelas Herman.

KTP-el Jadi Acuan Penetapan DPT

”

SAMPAI SAAT INI MASIH ADA KETIDAKSINKRONAN DATA DAFTAR PENDUDUK PEMILIH POTENSIAL PEMILU (DP4) KEMENDAGRI DENGAN DPT.

Politisi Partai Demokrat itu meminta Kemendagri bisa mengatasi ketidaksinkronan data ini. Herman juga mendorong KPU dan Bawaslu bekerja secara serius, karena Pemilu adalah kepentingan bersama. Ia menegaskan Pemilu harus berjalan sukses, pemilu harus damai, jujur, adil, dan legitimate.

Selain itu yang tak luput dari sorotan Tim Kunker Komisi II DPR RI yakni pembahasan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi, rekrutmen seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tenaga honorer, serta penyelesaian program KTP-el. ■ eko/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Eko/sf

Ketua DPR dan Menristekdikti Resmikan Universitas Perwira Purbalingga

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meresmikan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA), di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selain itu juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Baitul Salam di lahan seluas 200 meter persegi di lingkungan kampus UNPERBA.

Bansoet, sapaan akrab Ketua DPR RI menjelaskan, setelah resmi beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi



Ketua DPR Bambang Soesatyo didampingi Menristekdikti Mohamad Nasir meresmikan UNPERBA di Purbalingga. Foto: JakaJk

Logistik Pemilu di Sumsel Harus Aman

Distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ke sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) harus dipastikan aman. Di beberapa tempat distribusinya harus melalui perairan. Bahkan, untuk menjangkau beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) ada yang tak bisa dilewati kendaraan bermotor. Polda Sumsel diimbau mengamatkannya dengan baik, agar pesta demokrasi berjalan lancar.

Distribusi logistik Pemilu tetap harus sampai ke TPS terpencil dengan pengamanan yang proporsional. "Beberapa TPS tidak bisa dilewati dengan kendaraan. Harusnya ada antisipasi dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk akses jalan ke TPS yang harus ditempuh dengan berjalan kaki," harap Anggota Komisi II DPR RI Sudiro

Asno saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Palembang, Sumsel, Selasa (02/4).

Politikus Partai Hanura ini mengimbau aparat keamanan di Sumsel untuk melakukan skenario pengamanan logistik Pemilu. Jangan sampai ada sabotase di tengah distribusi logistik. Ia menyarankan agar distribusinya dilakukan pada H-3, bukan pada H-1. Dengan begitu ada waktu untuk melakukan evaluasi dan penggantian logistik bila ada yang hilang atau rusak.

Yang juga krusial, sambung Sudiro, pengamanan surat suara usai pencoblosan dan penghitungan. Polda Sumsel dibantu aparat TNI harus pula memastikan tidak ada kebocoran saat kotak suara dibawa ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aparat diimbau menjaga stabilitas keamanan dari ancaman konflik para pendukung politik yang merasa tidak puas.

Namun, secara umum ia menilai persiapan Pemilu di Sumsel sangat baik. Hanya saja yang dinilai masih mengganjal adalah sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). "DPT ganda perlu disisir kembali. Di sini perlu sinkronisasi data antara KPUD dan dinas kependudukan setempat," ujar legislator dapil Jawa Barat VIII itu menambahkan.

■ mh/sf



Anggota Komisi II DPR Sudiro Asno. Foto: HusenJk

dan Pendidikan Tinggi Nomor 949/KPT/I/2018 tanggal 8 November 2018, UNPERBA berencana menerima sekitar seribu mahasiswa baru melalui pendaftaran tahun ajaran 2019/2020.

"Diawali dengan membuka 2 Fakultas dan 5 Program Studi, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi S-1 Manajemen, Program Studi S-1 Akuntansi, Program Studi S-1 Agribisnis, serta Fakultas Sains dan Teknik dengan Program Studi S-1 Teknik Mesin, Program Studi S-1 Informatika. UNPERBA akan hadir mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Bamsoet, Kamis (11/4).

Turut hadir sejumlah tokoh seperti Plt Bupati Kabupaten Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Anggota IV Badan

Pemeriksa Keuangan Rizal Djali, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah Sugiharto dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Soewarto.

Bamsoet memaparkan, untuk tahap pertama yang telah diresmikan, UNPERBA menempati gedung empat lantai di lahan seluas dua hektar. Ruangannya ber-AC dan full internet system ini terdiri dari ruang administrasi, dosen, perkuliahan, laboratorium informatika dan laboratorium bahasa Inggris. "Pembangunan kampus tahap dua akan segera dilakukan di atas lahan seluas dua ribu meter persegi. Berbagai fakultas lain juga akan dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan generasi bangsa," papar politisi Partai Golkar itu.

Sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti

Purbalingga yang menaungi UNPERBA, dalam acara tersebut Bamsoet juga melantik Teguh Djuharyanto sebagai Rektor UNPERBA, Eming Sudiana sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Suprpto sebagai Wakil Rektor Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Prasarana.

"Jajaran rektorat UNPERBA yang didukung lebih dari 15 dosen berkualifikasi doktor (S3) dan lebih dari 15 dosen berkualifikasi magister (S2) harus mewujudkan iklim akademis yang kondusif. Sehingga mampu mewujudkan visi UNPERBA menjadi Entrepreneur University berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga lulusan UNPERBA tidak hanya dididik memiliki kualitas dan daya saing tinggi. Tetapi juga menjadi wirausaha unggul yang berwawasan global (internasional)," tegas Bamsoet. ■ jk/sf

Pemprov Sulsel Siap Laksanakan Pemilu 2019

Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah siap melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dari informasi yang didapatkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengalami masalah dalam mendistribusikan surat suara, bahkan pendistribusiannya sudah dilakukan sampai ke pulau-pulau terjauh. Jumlah surat suara yang rusak juga dilaporkan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga tidak ada masalah.

"Kendala yang dihadapi yaitu jangan sampai ada pihak-pihak atau instansi-instansi lain yang ikut mengeluarkan surat keterangan (suket). Suket itu sendiri diperlukan karena ada orang yang telah melakukan perekaman untuk KTP Elektronik, tetapi belum selesai KTP Elektroniknya itu," jelasnya saat memimpin Tim Kunjungan Reses Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi



Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan. Foto: Depjkr

Sulawesi Selatan, baru-baru ini.

Selain itu, ada sedikit kendala terkait pelatihan bagi saksi-saksi

partai politik. Dimana sampai saat ini masih ada parpol-parpol yang belum mengirimkan nama saksinya untuk dilatih di Bawaslu. Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, dalam ketentuan (peraturan) yang berlaku, disebutkan bahwa saksi di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah saksi yang sudah dilatih oleh Bawaslu.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa sebagian besar logistik surat suara sudah didistribusikan. Dikatakannya, khusus untuk daerah terpencil, ditargetkan pada awal bulan April sudah selesai didistribusikan.

"Kendala yang masih dihadapi adalah terkait pengiriman dan pendistribusian surat suara ke daerah-daerah terpencil. Karena akses untuk menuju ke lokasi pengiriman sangat sulit ditempuh. Namun sudah ada komitmen dari KPU bahwa diupayakan pendistribusiannya bisa selesai tepat waktu sesuai dengan perencanaan," ucapnya. ■ dep/sf

Komisi IV Tinjau Pabrik Es dan *Cool Storage* Raja Ampat

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI didampingi unit teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau langsung bangunan dan kegiatan pabrik es dan *cool storage* hasil kerja sama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat dengan BUMD Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena menjelaskan, bangunan pabrik es dan *cool storage* yang mulai beroperasi di tahun 2018 itu dinilai sangat membantu nelayan Kabupaten Raja Ampat dalam mempertahankan kualitas dan kuantitas hasil perikanan mereka.

Dalam kesempatan itu, Michael juga menerima usulan Dinas Perikanan dan Kelautan Raja Ampat untuk pembangunan *cool storage* lainnya yang berlokasi dekat dengan laut. "Hal ini agar ke depan, memangkas biaya pengangkutan dan penggunaan es yang lebih efisien oleh nelayan Raja

Ampat," ujar Michael di Raja Ampat, Papua. baru-baru ini.

Politisi dapil Papua Barat ini pun menganjurkan peningkatan produksi volume es yang dihasilkan, namun perlu tetap diperhatikan agar tidak melebihi kapasitas produksi yang

”

SEJUMLAH NELAYAN MENGELUHKAN JAUHNYA JARAK LOKASI PABRIK ES DAN COOL STORAGE DARI DERMAGA PERIKANAN.

dibutuhkan masyarakat nelayan.

Dalam kesempatan itu, sejumlah nelayan mengeluhkan jauhnya jarak lokasi pabrik es dan *cool storage* dari dermaga perikanan.

Imbasnya, mereka harus menambah biaya lagi untuk

mengambil es dan mengirim ikan hasil tangkapannya ke *cool storage* tersebut. Nelayan setempat berharap agar pabrik es dan *cool storage* dipindah ke dermaga perikanan atau yang lebih dekat dengan kegiatan nelayan.

Tim Kunker Komisi IV DPR RI tidak hanya melihat langsung produksi es yang dapat mencapai 15 ton ini, namun juga melihat *cool storage* yang mampu menampung maksimum 40 ton hasil perikanan masyarakat Raja Ampat.

Masih dalam rangkaian Kunker ini, Komisi IV DPR RI dan KKP memberikan bantuan satu unit *ice flake machine* kapasitas 1,5 ton per hari kepada koperasi produsen nelayan tradisional kampung saporkren Kabupaten Raja Ampat. Bupati Raja Ampat mengapresiasi bantuan tersebut dan pihaknya akan berkoordinasi untuk membangun pabrik es dan *cool storage* yang lebih dekat dengan kegiatan nelayan setempat. ■ man/sf



Tim Kunker Reses Komisi IV DPR meninjau Pabrik es dan *cool storage* di Raja Ampat. Foto: Andrijk

Jalur KA Makassar-Parepare Diduga Sebabkan Banjir di Barru

Pembangunan jalur Kereta Api (KA) Makassar - Parepare menyisakan dampak lingkungan. Diduga, pembangunan ini berdampak pada meluasnya banjir tahunan yang melanda wilayah Kabupaten Barru dan sekitarnya pada akhir Desember 2018 silam. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir (F-Golkar) mendorong Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan segera berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperbanyak bukaan saluran air di sepanjang jalur KA.

"Kemungkinan adanya saluran air yang sempit namun ternyata arus airnya besar tentu ini perlu penanganan segera untuk meminimalisir dampak banjir. Atau ada juga yang debit airnya kecil tapi justru dibuat saluran airnya cukup besar," kata Ibnu pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Bupati Barru Suardi Saleh, di Rumah Dinas Bupati dengan dihadiri seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI, baru-baru ini.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Ditjen Perkeretaapian agar lebih baik lagi dalam proses perencanaan terkait pembangunan jalur KA, sehingga tidak memunculkan masalah baru terkait lingkungan berupa banjir bandang. Perlu kerja cepat para pemangku kepentingan untuk melakukan terobosan pembuatan gorong-gorong di sepanjang jalur KA Makassar - Parepare agar kasus banjir bandang tidak terulang kembali," pinta Ridwan.

Legislator Partai Golkar ini berharap ada kerja sama para pemangku kepentingan dalam hal ini



Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI meninjau pembangunan jalur Kereta Api Makassar - Parepare. Foto: Ojijk

Ditjen Perkeretaapian Kemnehub dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menanggulangi masalah kekurangan saluran air dan gorong-gorong sebagai solusi meminimalisir terjadinya banjir akibat pembangunan jalur KA.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru Suardi Saleh menduga, salah satu penyebab banjir besar yang melanda Barru pada akhir Desember 2018 silam adalah proyek pembangunan rel KA. Ia menjelaskan, tak adanya saluran air dari di sekitar jalur kereta api membuat air dari arah pegunungan yang berada di sepanjang timur Barru mengalir ke

sungai dan membuat sungai meluap. Menurutnya, potensi banjir besar akibat proyek rel KA di Barru sudah terlihat sejak tahun lalu.

Ia juga memberi masukan terkait jalur di bawah rel KA atau underpass. Menurutnya underpass yang dibangun saat ini tidak layak karena menjadi kubangan air setiap hujan. "Agar bencana serupa tak lagi terjadi ditahun-tahun mendatang, mohon membuat kajian tentang hal ini. Karena air yang massif dari gunung tertahan oleh rel KA. Posisi kita bukan menolak kebijakan nasional, tapi memberi masukan agar tak memberi ekses negatif kepada warga," pungkasnya.

■ oji/sf

Jalankan BBM Satu Harga, Pertamina Tak Boleh Merugi

Kebijakan pemerintah yang menyatukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak boleh menjadikan PT.

Pertamina (Persero) merugi. Kebijakan satu harga BBM ini ingin melindungi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan BBM dengan mudah dan murah, namun di

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, efisiensi, berkeadilan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan, serta kemajuan ekonomi nasional.

"Saya maklum sekali apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo jangan sampai ada suatu barang yang di Indonesia bagian barat cukup dibeli

BBM satu harga, Pertamina harus mampu memproduksi BBM yang bisa menyeimbangkan keuntungan dengan misi mensejahterakan rakyat.

Saat ini, menurut politisi Partai Demokrat itu, untuk meningkatkan kapasitas produksi, Pertamina Plaju sudah melakukan perluasan pabrik. Perluasan ini juga untuk menampung

”

KEBIJAKAN SATU HARGA BBM INI INGIN MELINDUNGI RAKYAT INDONESIA DARI SABANG SAMPAI MERAUKE UNTUK MENDAPATKAN BBM DENGAN MUDAH DAN MURAH.

sisi lain kinerja keuangan Pertamina jangan sampai minus. Kebijakan ini perlu diapresiasi karena sesuai konstitusi.

"Presiden harus mensejahterakan rakyatnya, salah satunya dengan menyatukan harga BBM untuk wilayah Indonesia bagian barat dan timur," kata Anggota Komisi VI DPR RI Irmadi Lubis usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kilang pemurnian minyak (refinery unit) III Plaju, di Kota Palembang, Sumatera Selatan, baru-baru ini.

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945 pasal 33 disebutkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan



Anggota Komisi VI DPR Irmadi Lubis. Foto: Ariefjfk

hanya Rp 1.000, tapi di Indonesia bagian timur harganya bisa 10 kali lipat. Ini merupakan kewajiban negara untuk memudahkan akses BBM bagi rakyatnya," dorong legislator dapil Sumatera Utara I itu.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, peralatan teknologi kilang minyak di Plaju, Sumsel ini ternyata sudah tua. Sebagai perusahaan BUMN, Pertamina juga dituntut mendatangkan keuntungan. Dengan kondisi peralatan yang sudah tua, apalagi ada kebijakan

produksi biodiesel 20 (B20). Soal produksi B20 yang ditargetkan sudah mencapai 100 persen di tahun 2018 ini. Wahyu berharap produksinya bisa ditingkatkan lagi menjadi 120 persen pada tahun 2019.

"Penduduk terus bertambah, maka konsumsi energi juga bertambah. Akan terjadi demand yang lebih tinggi. Kita berharap pemerintah juga mengurangi impor BBM. Pertamina harus menaikkan kapasitas kilangnya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri," dorong legislator dapil Sumsel II ini. . ■ afr/sf

Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Komisi VII Tinjau Perusahaan Sawit di Riau

Anggota Komisi VII DPR RI Denny Jaya Abri Yani mengatakan, pihaknya mendapat aduan dari masyarakat Kabupaten Pelalawan bahwa ada perusahaan yang memakai lahan lebih dari Hak Guna Usaha (HGU), penyimpangan pengelolaan limbah perusahaan, hingga permasalahan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Untuk itu, Komisi VII DPR RI menindaklanjuti aduan itu dengan meninjau beberapa perusahaan sawit di Pelalawan, Riau.

“Kita datang kemari merupakan tugas pengawasan DPR RI, dimana ada aduan dari masyarakat bahwa ada perusahaan yang menggunakan lahannya lebih dari HGU. Selain itu juga kita melihat langsung pengelolaan limbah, CSR perusahaannya, dan kelengkapan perizinannya sudah memenuhi atau belum,” ungkap Denny di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Pelalawan, Riau, baru-baru ini.

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu menyampaikan bahwa Komisi VII

DPR RI melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen) Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta untuk mengecek dan memverifikasi kembali kelengkapan perizinan perusahaan sudah sesuai atau belum.

Selain itu, Denny mengkritisi proses Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) yang hanya sebatas laporan dari perusahaan saja, kemudian hasil Proper-nya keluar tanpa verifikasi dan melihat langsung ke lapangan untuk mengecek secara detail perusahaan.

“Kita agak heran juga, dengan sistem penilaian Proper ini yang hanya sebatas laporan dari perusahaan tanpa ada verifikasi dan pengecekan langsung di lapangan. Kita akan memanggil pihak-pihak terkait yang mengeluarkan Proper ini, kita akan minta pertanggungjawaban dan evaluasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait adanya beberapa perusahaan yang tidak memiliki perkebunan plasma, Denny menegaskan bahwa perkebunan

plasma merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi perusahaan yang menggunakan lahan HGU.

“Mereka katakan bahwa perkebunan plasma sedang dalam proses, dan ini akan terus kita awasi bahwa perusahaan-perusahaan itu nantinya akan benar-benar mengadakan perkebunan plasma bagi masyarakat atau tidak. Di beberapa tempat sudah ada perusahaan yang diberi sanksi, akibat kelengkapan perizinannya tidak sesuai,” ujar Denny.

Legislator dapil Jawa Barat IX itu juga berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau bisa memenuhi kelengkapan perizinan yang ada, terutama lingkungan hidup juga harus menjadi perhatian serta hak-hak masyarakat sekitar bisa dilaksanakan dengan baik.

Di sisi lain, menjamurnya perkebunan kelapa sawit di Riau membawa dampak buruk pada lingkungan. Dampak dari alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit mulai dirasakan masyarakat sejak 17 tahun silam, Riau mengalami kebakaran hutan di mana-mana. ■ skr/sf

Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI meninjau beberapa perusahaan sawit di Pelalawan, Riau. Foto: Singgihjkk



Embarkasi Haji Antara Riau Sudah Representatif

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menilai fasilitas dan infrastruktur Embarkasi Haji Antara Riau sudah representatif. Baik ruang tidur, ruang makan dan fasilitas lain dinilai sudah cukup bagus. Namun ia mendorong adanya penghijauan di area embarkasi, sehingga menambah suasana yang lebih asri.

“Menurut saya perlu penghijauan di area luar, karena masih gersang. Apalagi iklim di Riau panas. Ditambah jemaah kita banyak yang lansia, jika kekurangan oksigen dikhawatirkan bisa memicu penyakit,” ungkap Endang usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI meninjau Embarkasi Haji Antara Riau, Pekanbaru, Riau, Senin.

”

SYARAT UTAMANYA SUDAH TERPENUHI HANYA SAJA TINGKAT KENYAMANAN PERLU DIDISKUSIKAN.

Endang pun mendorong sinergi antara pemerintah provinsi (pemprov) dan Kementerian Agama untuk mempersiapkan sejumlah fasilitas pendukung tersebut agar nantinya menjadi lebih matang. “Syarat utamanya sudah terpenuhi, hanya saja tingkat

kenyamanan perlu didiskusikan. Namun itu bukan lagi halangan karena secara umum sudah memenuhi standar embarkasi haji antara,” imbuh Endang.

Dengan dioperasikannya Embarkasi Haji Antara Riau, maka nantinya calon jemaah Haji dari Provinsi Riau tidak lagi perlu menginap di Batam, Kepulauan Riau. Politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III itu menilai hal ini dapat lebih memudahkan dan sangat membantu meringankan beban calon jemaah Haji.

“Melalui Embarkasi Haji Antara Riau ini juga menguntungkan bagi jemaah Haji yang ada di dua belas kabupaten kota se-Riau, daripada mereka harus membeli tiket dan menggunakan kendaraan sendiri ke Batam, tentu jauh lebih sulit kondisinya,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Untuk itu Endang mengimbau kepada Kementerian Agama untuk segera menerbitkan SK Embarkasi Haji Antara. Dirinya juga mendorong Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Ditjen PHU) untuk segera merealisasikan embarkasi secepatnya. “Komunikasi tentunya berjalan dan tidak berhenti. Kita terus follow up Ditjen PHU, sehingga Pemprov Riau bisa lebih matang mempersiapkan layanan jemaah Haji ini,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenag Riau Mahyudin menyambut baik kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Riau. Mahyudin menyatakan kunjungan ini dinilai penting, khususnya fokus pada persiapan untuk segera terwujudnya embarkasi Haji antara Riau. “Semoga melalui kunjungan uni SK Embarkasi Haji Antara Riau bisa segera dikeluarkan,” harapnya. ■ tra/sf



Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI meninjau Embarkasi Haji Antara Riau, Pekanbaru. Foto: Tiara/fk

Komisi IX Serap Masukan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Pekerja Informal



Tim Kunspek Reses Komisi IX DPR RI bertukar cenderamata dengan jajaran Pemerintah Kota Surakarta. Foto: AyuJk

Komisi IX DPR RI menyerap masukan dari berbagai asosiasi pekerja informal terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI mendapat informasi, jumlah kepesertaan tenaga kerja informal di Jateng masih sangat minim dibanding dengan kepesertaan sektor formal.

“Kami sengaja mendatangi provinsi Jawa Tengah ini khususnya Kota Surakarta salah satunya untuk mengetahui kepesertaan BPJS bagi tenaga kerja informal,” ungkap Anggota

”

**ANGGOTA APMISO
TELAH MENJADI
PESERTA BPJS
KETENAGAKERJAAN
SEJAK MASIH
BERBENTUK JAMSOSTEK.**

Komisi IX DPR RI Imam Suroso di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Kota Surakarta, di Kantor Wali Kota Surakarta,

baru-baru ini.

Salah satu masukan berasal dari Lasiman, perwakilan dari Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Jawa Tengah (APMISO). Dikatakannya, Anggota APMISO telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak masih berbentuk Jamsostek. Namun perubahan dari Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan juga dibarengi dengan perubahan regulasi atau skema dari jaminan sosial ini. Salah satunya dengan dihilangkannya bantuan lunak berupa permodalan bagi peserta BPJS. Hal ini sangat disesalkan mereka.

Menanggapi hal itu, Imam mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan DPR RI masih terus berupaya menyempurnakan program tersebut. Termasuk dengan masukan untuk mengembalikan lagi keberadaan bantuan lunak bagi peserta BPJS informal tersebut. Hal tersebut tentunya harus didasarkan pada kondisi keuangan BPJS itu sendiri. Meski demikian, pihaknya akan terus mendukung termasuk dari sisi anggaran jika memang dibutuhkan.

Sementara itu Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo menjelaskan, di kota yang dipimpinnya, pihaknya masih terus memberikan bantuan lunak berupa permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang notabene sudah tergabung dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut semata untuk pengembangan UKM tersebut, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Surakarta itu sendiri. ■ ayu/sf



Wakil Ketua Komisi X
DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Foto: Singgihjk

NTB Siap Jadi Tuan Rumah MotoGP

Indonesia telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah MotoGP pada tahun 2021, tepatnya di kawasan Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta agar pembangunan infrastruktur segera dicicil seperti pelabuhan, perpanjangan runway, akses jalan menuju venue serta infrastruktur pendukung lainnya. Ia yakin NTB siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan balap motor tingkat dunia ini.

"Kita kan telah berpengalaman menyelenggarakan *event* besar seperti Asian Games dan Asian Para Games yang telah berhasil dengan baik, baik dari segi infrastrukturnya maupun penyelenggaraannya. Kita harap kesuksesan ini bisa ditularkan pada penyelenggaraan MotoGP nanti pada tahun 2021," ungkap Fikri saat memimpin

”

**DENGAN
DITUNJUKNYA NTB
SEBAGAI TUAN RUMAH
MOTOGP MAKA
TINGKAT KUNJUNGAN
KE NTB PUN AKAN
MENINGKAT**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke NTB, baru-baru ini.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan bahwa dengan ditunjuknya NTB sebagai tuan rumah MotoGP, maka akan menumbuhkan tingkat kunjungan

wisatawan mancanegara maupun domestik ke NTB, dimana provinsi ini memiliki destinasi wisata alam yang melimpah.

"Ini tentu sangat positif bagi Indonesia, khususnya NTB. Dengan ditunjuknya NTB sebagai tuan rumah MotoGP maka tingkat kunjungan ke NTB pun akan meningkat, dan ini tentu akan lebih menambah pemasukan devisa dari sektor pariwisata," ungkapnya.

Fikri juga menyatakan, penyelenggaraan MotoGP di NTB bisa dijadikan *sport tourism* seperti negara-negara Asia Tenggara yang sudah lebih dulu menjadi tuan rumah MotoGP. "Ini event internasional, maka nama baik Indonesia juga dipertaruhkan. Oleh karena itu, kita minta ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan dukungan semua pihak," ujar Fikri.

Legislator dapil Jawa Tengah itu juga meminta pemerintah pusat, daerah maupun semua komponen bangsa ini untuk terus mempromosikan bahwa NTB saat ini sudah kondusif walaupun belum lama ini dilanda bencana alam. "NTB sudah kondusif untuk dikunjungi wisatawan dan siap menjadi tuan rumah MotoGP tahun 2021," ujarnya. ■ skr/sf

Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan

Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengatakan, berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR RI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pendapatan negara tahun 2019 ini diperkirakan mencapai Rp 2.165,1 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,3 triliun. Penerimaan perpajakan selalu menempati posisi teratas dalam menyumbang pendapatan negara.

“Perpajakan merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara. Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sendiri sumbangan yang masuk kas negara mencapai Rp 378,2 triliun.



Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal. Foto: Arief/jk

Sementara hibah mencapai Rp 435,3 miliar,” kata Refrizal usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses

Komisi XI DPR RI dengan perwakilan BPK, BPS, dan BPKP Sumbar di Padang, Sumbar, baru-baru ini.

Pada sektor belanja negara, lanjut Refrizal, prediksinya mencapai Rp 2.461,1 triliun yang masing-masing akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.634,3 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 826,77 triliun. Berarti masih ada defisit Rp 296 triliun. Untuk menutup defisit, menurutnya penerimaan perpajakan harus lebih ditingkatkan. Ini menuntut kerja ekstra para Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam menjalankan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ke depan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan harus terus dioptimalkan dari tahun ke tahun,” harap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. ■ *afr/sf*



Segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
serta Setjen dan Badan Keahlian DPR RI

Mengucapkan

*Turut
Berduka
Cita*

atas wafatnya



H. Oo Sutisna, SH

Anggota Komisi IV DPR RI
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Dapil Jawa Barat IX
Senin, 15 April 2019



Perlu Sinergi Antar Daerah Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi



Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Foto: Ekojok

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara merata diperlukan sinergi yang kuat antar daerah untuk menumbuhkan investasi dan menarik investor. Ia mendapatkan laporan, di Provinsi Jawa Timur masih terjadi disparitas antara ring satu dengan ring dua.

"Hal ini menjadi perhatian kita bersama agar pertumbuhan ekonomi merata," ungkapnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jatim, OJK, LPS, Perbankan, Askrindo dan Jamkrindo tentang sistem pembayaran dan kondisi industri jasa keuangan, Surabaya, Jatim, baru-baru ini.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, pemerintah daerah perlu menumbuhkan sumber ekonomi di setiap daerah

”

TERLEBIH PEMERINTAH TELAH MEMBERIKAN KEMUDAHAN MELALUI DANA DESA SERTA HADIRNYA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK MEMBANTU MENUMBUH KEMBANKAN UMKM.

dan saling berkoordinasi. Terlebih pemerintah telah memberikan kemudahan melalui Dana Desa serta hadirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu menumbuhkan kembangkan UMKM.

"Untuk itu, peran pemerintah sangat penting di sini agar KUR bisa lebih

optimal membantu mensejahterakan dan bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Timur," harap Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, penguatan pengawasan oleh BPK sangat penting bagi manfaat Dana Desa yang lebih baik. Dengan begitu, pemerintah menjalankan perannya dalam mengawasi pelaksanaan Dana Desa. Sementara pengawasan secara politik yang dilakukan DPR RI bisa menjadi sebuah sinergi untuk mengefektifkan Dana Desa sebagai pertumbuhan ekonomi.

"Berdasarkan laporan di Jatim telah dilakukan uji petik di 5 wilayah penerima Dana Desa. Hasilnya baik, namun perlu peningkatan penggunaan Dana Desa. Perlu ada pelatihan kepada aparat desa agar Dana Desa bermanfaat dengan baik," jelas politisi Partai Golkar itu. ■ rnm/sf

Baleg Usulkan Peningkatan Kelembagaan BSSN



Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas. Foto: Kresno/jk

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Atgas mengusulkan peningkatan kapasitas Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) melalui RUU Kemanan dan Ketahanan Siber. Ia menyampaikan, saat ini ada 290 juta serangan keamanan siber di Indonesia setiap harinya. Serangan ini kalau tidak ditangkal, bisa mengakibatkan kelumpuhan pada siber negara, terlebih lagi kalau yang diserang adalah sektor ekonomi, maka dampaknya bisa sangat buruk.

"Kita ingin meningkatkan kapasitas kelembagaan maupun kapasitas struktural yang ada di BSSN, itu yang menjadi urgensi dari undang-undang ini. Namun demikian ini baru masukan awal," ungkap Supratman usai rapat dengan jajaran BSSN di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

”

RUU INI MENDESAK UNTUK DIBAHAS DEMI KEAMANAN SIBER NEGARA, TERLEBIH LAGI JIKA ADA SERANGAN DI SEKTOR EKONOMI, MAKA DAMPAKNYA SANGAT BAHAYA BAGI PEREKONOMIAN NEGARA.

Meskipun demikian, Baleg akan menampung usul dan masukan dari lembaga lain guna penyempurnaan RUU yang menjadi usul inisiatif DPR RI. "Kita akan melihat nanti kedepan masukan-

masukan dari kementerian atau lembaga yang lain untuk lebih menyempurnakan sehingga undang-undang ini, usul inisiatif ini bisa lebih komprehensif mengatur keamanan saiber ini," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Bagi Baleg, RUU ini mendesak untuk dibahas demi keamanan siber negara, terlebih lagi jika ada serangan di sektor ekonomi, maka dampaknya sangat bahaya bagi perekonomian negara. "Bayangkan kalau yang di-hack sektor perbankan atau pasar modal kita, belum lagi listrik dan lain sebagainya, itu bisa melumpuhkan ekonomi kita. Oleh karena itu, RUU ini sangat penting dalam rangka memberi kepastian menyangkut soal kelembagaan, soal dukungan anggaran kepada Badan Siber dan Sandi Negara," jelas Supratman.

Di sisi lain, Kepala BSSN Djoko Setiadi menyampaikan poin penting tentang keamanan dan ketahanan siber, menurutnya, dunia siber secara teknis merupakan arsitektur *hyperconnectivity* global yang dampak pemanfaatannya terhadap aspek impoleksosbudhankam nasional sangat besar. Jumlah penetrasi pengguna internet Indonesia saat ini sampai dengan 150 juta jiwa. Sedangkan jumlah serangan siber di Indonesia sampai dengan 2018 mencapai 229,4 juta serangan.

Indonesia memerlukan kemampuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman, memberikan proteksi, menanggulangi dan memulihkan serta memantau dan mengendalikan berbagai kerentanan pada sumber daya siber nasional. Oleh sebab itu BSSN menyambut baik usul inisiatif DPR RI. "BSSN menyambut baik usulan DPR RI mengenai RUU tentang keamanan dan ketahanan siber atau RUU Kamhan Siber," ungkap Djoko. ■ eko/sf

Sekjen DPR Tekankan Penguatan Integritas ASN



Sekjen DPR RI Indra Iskandar melantik dan mengambil sumpah/janji 55 PNS/ASN Tahun Angkatan 2017. Foto: arief/jk

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menekankan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang baru saja dilantik, untuk mengedepankan seluruh norma dan nilai kode etik dalam menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya integritas, yang merupakan poin terpenting dalam meniti karir. Begitupun dengan peningkatan kapasitas seiring dengan kemajuan zaman yang ada saat ini.

“Jadi kalau punya prestasi yang baik dan punya kemampuan yang baik, tapi tidak dilandasi dengan integritas, maka organisasi itu juga akan hancur. Jadi integritas itu penting, karena integritas itu adalah kesatuan antara perbuatan dan ucapan,” kata Indra usai melantik dan mengambil sumpah/janji 55 PNS/

ASN Tahun Angkatan 2017 lingkungan Setjen dan BK DPR RI, di Ruang Pustaka Loka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).

Terkait peningkatan kapasitas ASN, Indra mengatakan hal tersebut merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dihindari lagi bagi ASN untuk menguasai teknologi informasi secara baik. Mengingat ke depannya Setjen dan BK DPR RI akan mengembangkan model kerja yang *paperless*, sehingga para ASN yang baru saja dilantik diminta agar menyiapkan diri dengan kemampuan teknologi yang baik. Juga kerangka pikiran yang baik pula, guna memahami teknologi yang saat ini sedang gencar dengan revolusi industri 4.0.

Indra juga menjelaskan, sebelum para ASN ini dinyatakan lulus 100 persen

dan dilantik, mereka sudah mengikuti masa percobaan selama setahun di unit kerjanya masing-masing. Yakni dengan pembekalan modal latihan dasar kepemimpinan, juga orientasi di bidang pengerjaannya agar memahami aspek *leadership* yang sudah dibekali oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI. Selain itu, Indra juga berharap, para ASN tersebut memahami semangat reformasi birokrasi (RB) yang saat ini digalakkan.

“Jadi nanti pada sesi mereka sudah diangkat, ada semacam pra jabatan. Mereka akan dibekali dengan pemahaman reformasi birokrasi dan apa yang akan mereka lakukan. Karena dalam aturan Menteri PAN-RB disebutkan, setiap ASN harus memahami 8 area perubahan. Karena mereka juga tersebar di berbagai unit, nanti dari situ mereka akan memahami bermacam-macam area perubahan dan RB di kita sudah sejauh mana, dan ke depan seperti apa. Mereka harus bisa secara cepat mengikuti perubahan-perubahan tersebut,” paparnya.

Sementara Pelaksana Tugas Deputi Bidang Administrasi Nunu Nugraha menyampaikan laporan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Setjen dan BK DPR RI TA 2017. Disebutkan bahwa pada Tahun Anggaran 2017, ditetapkan 85 orang formasi kebutuhan PNS di Setjen dan BK DPR RI, dengan komposisi formasi 37 jabatan pelaksana dan 48 jabatan jabatan fungsional. Pendaftaran memiliki jumlah pelamar sebanyak 2.101 orang yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

“Dari jumlah pelamar dinyatakan lulus 558 orang, terdiri dari 549 formasi umum dan 9 orang formasi *cumlaude*. Lalu 558 peserta yang lulus seleksi administrasi mengikuti tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan metode CAT BKN. Kemudian 196 orang lulus tahapan tersebut, sehingga menyusut menjadi 57 orang yang lulus tes psikotest dan wawancara. Namun 2 orang pelamar mengundurkan diri, jadi seluruhnya ada 55 orang jumlah CPNS Setjen dan BK DPR RI TA 2017,” tutupnya. ■ **ady/sf**

Kelola Dana Desa, Perlu Pelibatan Perguruan Tinggi

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar menekankan, perlu ada pelibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, perguruan tinggi bisa terlibat dalam membantu desa agar bisa mengelola Dana Desa dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

”

PERGURUAN TINGGI BISA TERLIBAT DALAM MEMBANTU DESA AGAR BISA MENGELOLA DANA DESA DENGAN BAIK.

Hal itu diungkapkan Helmi, sapaan akrabnya, usai memimpin tim PKAKN BK DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang akuntabilitas Dana Desa dengan civitas akademika Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) Universitas Gadjah Mada (UGM),



Kepala PKAKN Badan Keahlian DPR RI Helmizar. Foto: Geraldi/jk

di Kampus UGM, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kamis (11/4).

“Tujuan kami ke UGM ingin merumuskan keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan Dana Desa. Setelah berdiskusi, kami mendapatkan masukan yang bisa kami suarkan ke Anggota DPR RI bagaimana caranya perguruan tinggi dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa,” jelas Helmi.

Helmi mengapresiasi pertemuan dan diskusi dengan MEP UGM ini. Bahkan menurutnya, UGM bisa menjadi contoh dan bibit untuk melahirkan model pelibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Dalam kesempatan ini, PKAKN BK DPR RI juga menyerap informasi mengenai implementasi Dana Desa dari akademika MEP UGM. ■ opl/sf



Koperasi DPR Berikan Pinjaman Nol Persen

Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI telah melakukan banyak hal pada bidang organisasi, diantaranya adalah pendidikan koperasi, studi banding penambahan anggota koperasi, serta menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan koperasi. Ketua Pengurus Koperasi Setjen dan BK DPR RI Mohammad Djazuli menambahkan, dari segi benefit pihaknya juga membuat peraturan pinjaman nol persen.

“Kami juga membuat penurunan jasa pinjaman sampai dengan 0,5 persen, peningkatan pagu pinjaman sampai dengan Rp 400 juta, serta kecepatan pinjaman dalam waktu satu hari,” ucap Djazuli saat menyampaikan laporan pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI ke 33 Tahun Buku 2018 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta (15/4).

Dikatakannya, pengurus Koperasi Pegawai Setjen dan BK DPR RI juga melakukan *tax planing* perencanaan pembayaran pajak, yang artinya benefit untuk anggota antara lain adalah peningkatan *voucher* ulang tahun menjadi Rp 419 juta, paket lebaran sebesar Rp 738 juta, simpanan pensiun Rp 687 juta, dan tali asih pensiun sebesar Rp 375 juta.

Kemudian, bantuan sosial KORPRI senilai Rp 150 juta, seragam olahraga Rp 277 juta, dan simpanan anggota perralihan dari asuransi kesehatan sebesar Rp 720 juta. “Jumlah totalnya Rp 3,357 miliar yang kami bagikan kepada seluruh anggota. Semua adalah demi kesejahteraan anggota, meskipun hal itu akan mengurangi sisa hasil usaha (SHU) tahun 2018,” tandasnya.



Ketua Pengurus Koperasi Setjen dan BK DPR RI Mohammad Djazuli. Foto: Azka/jk

”

SEJAK TAHUN 2016, KOPERASI PEGAWAI SETJEN DAN BK DPR RI SUDAH BERKOMITMEN UNTUK IKUT DALAM TAX AMNESTY.

Djazuli mengatakan, sejak tahun 2016, Koperasi Pegawai Setjen dan BK DPR RI sudah berkomitmen untuk ikut dalam *tax amnesty*. Oleh karenanya semua data telah disampaikan secara terbuka dan online. “Kami juga telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedua kalinya,” ujarnya.

Untuk agenda ke depan, sambung Djazuli, pengurus koperasi akan menawarkan program asuransi kesehatan nol persen. Selain itu, akan ada juga pemberian *cash back* di (kantin) Pujasera. Pada kesempatan tersebut, diadakan undian hadiah 6 paket Umrah, satu unit sepeda motor, puluhan voucher belanja, satu unit TV 32 inch, serta pemberian *reward* kepada anggota koperasi selaku nasabah yang aktif sebesar Rp 500 ribu.

“Kami juga menyerahkan secara simbolis tapcash BNI kepada Sekjen DPR RI selaku Pembina Koperasi Pegawai Setjen dan BK DPR RI, dan juga kepada pejabat eselon II di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, yang dapat digunakan untuk berbelanja di kantin Pujasera. Kami berharap, (hal ini) dapat melengkapi dan mempermudah bagi anggota koperasi untuk melakukan transaksi,” pungkasnya. ■

dep/sf

Wartawan Harus Ambil Peran Bagi Kemajuan Pariwisata Danau Toba

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwasanya melalui Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan DPR RI, atau yang dikenal *Press Gathering* Koordinatoriat Wartawan DPR RI, para wartawan yang tergabung di dalamnya harus mampu memberikan sumbang saran dalam mewujudkan kemajuan pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi dan Karo.

Hal tersebut diungkapkan Indra saat memberikan sambutan dalam Forum Komunikasi Dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI, Pimpinan DPR dan Koordinatoriat Wartawan DPR RI bertema “Keindahan Panorama Danau Toba Sebagai Milik Masyarakat Dunia, Dan Kesiapan Masyarakat Untuk Menerima Danau Toba Sebagai Daerah Pariwisata, Untuk Pembangunan Infrastruktur Menghadapi Tahun 2025” di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, baru-baru ini. Forum dibuka oleh Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing.

“Dalam forum ini, diharapkan DPR bersama dengan Koordinatoriat Wartawan tidak hanya mendapatkan informasi, melainkan juga menyerap aspirasi dari para narasumber dan masyarakat, dengan harapan kelaknya mampu memberikan sumbang saran kepada pemangku kebijakan dalam mewujudkan kemajuan pariwisata,” kata Indra. Turut mendampingi Indra, Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari.

Sebagai salah satu pilar demokrasi,



Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Foto: Gerakdijik

”

PERS MEMPUNYAI POSISI STRATEGIS DALAM MENDISEMINASIKAN INFORMASI, MENYAJIKAN DATA DAN FAKTA DALAM RANGKA PENDIDIKAN KEPADA PUBLIK, SEKALIGUS MENJADI ALAT KONTROL SOSIAL.

tambah Indra, pers mempunyai posisi strategis dalam mendiseminasikan informasi, menyajikan data dan fakta dalam rangka pendidikan kepada publik, sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Oleh karenanya, menjadi tugas krusial bagi wartawan untuk dapat

meninformasikan kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan tugas serta fungsi DPR RI kepada masyarakat, yang juga dapat mendorong terwujudnya DPR RI sebagai parlemen terbuka.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Koordinatoriat Wartawan DPR RI Romdony Setiawan menambahkan, ke depan pihaknya akan terus berkonsolidasi dengan DPR RI dalam menyosialisasikan program-program kedewanan. Mengingat, banyak sekali terobosan dan kinerja yang telah diperbuat oleh DPR RI untuk masyarakat yang belum terpublikasi dan lepas dari sorotan media.

“Tantangan ke depan kita harus bisa berfikir jernih dalam memberitakan DPR, seringkali hanya karena satu atau dua orang saja, lembaga ini terkena imbasnya. Masih ada lebih ratusan Anggota Dewan yang terus bekerja demi kemajuan masyarakat dan negara. Untuk itu, rekan-rekan media juga harus membantu memberitakan kebaikan lembaga ini,” pinta Dony, sapaan akrab Romdony. ■ es,tn/sf



Ketua DWP Setjen dan BK DPR RI Tanti Setyanta Nugraha bertukar cenderamata dengan Ketua DWP Kota Surabaya. Foto: Ria/jk

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melaksanakan kunjungan *benchmarking* ke DWP Kota Surabaya, dalam rangka mewujudkan kualitas organisasi yang mandiri dan berkinerja tinggi serta mempererat silaturahmi di antara sesama organisasi.

Ketua DWP Setjen dan BK DPR Tanti Setyanta Nugraha mengatakan, dipilihnya DWP Kota Surabaya karena dinilai lebih maju dalam mengelola berbagai kegiatan, khususnya di bidang pendidikan.

"DWP Surabaya memiliki sekolah binaan dari tingkat TK, SMP, hingga SMA yang sangat maju. Nah, kita ke sini untuk melihat bagaimana pengelolaan bidang pendidikan di sini," jelasnya usai memimpin pertemuan DWP Setjen dan BK DPR RI dengan DWP Kota Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.

Pasalnya, dijelaskan Tanti, TK binaan Dharma Wanita Setjen dan

Sinergi DWP Tingkatkan Kinerja Organisasi

”

DIPILIHNYA DWP KOTA SURABAYA KARENA DINILAI LEBIH MAJU DALAM MENGELOLA BERBAGAI KEGIATAN, KHUSUSNYA DI BIDANG PENDIDIKAN.

BK DPR belum maju seperti yang dikembangkan DWP Surabaya. Untuk itu, pihaknya mengunjungi langsung TK binaan DWP Surabaya untuk mengetahui cara pengelolaan hingga fasilitas yang diberikan.

Di tempat yang sama, Ketua DWP Surabaya Iis Hendra Gunawan mengapresiasi kunjungan DWP Setjen dan BK DPR RI. "Sinergi DWP harus kita tularkan. Kalau kita saling mengunjungi seperti ini pasti akan semakin menunjukkan kekuatan kerja sama multipihak antar DWP seluruh Indonesia," jelasnya. ■ rnm/sf

BKSAP Ajak Generasi Muda Bela Negara Melalui Politik

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengajak generasi muda

untuk meningkatkan literasi. Berpolitik saja tidak hanya cukup, tetapi harus diimbangi dengan pengetahuan untuk menjawab peluang dan tantangan dalam menghadapi arus persaingan global.

“Anak-anak harus terus diberikan edukasi bahwa politik adalah tempat pengabdian, bagaimana kita bisa bela negara melalui politik. Kalau kita memang ingin mengabdikan, maka jadikanlah politik sebuah pengabdian bukan tempat mencari jabatan,” kata Nurhayati saat dialog interaktif BKSAP Day bersama pelajar SMAN 1 Lawang, di Malang, Jawa Timur, Kamis (11/4).

BKSAP Day merupakan acara rutin yang diselenggarakan dengan tujuan memperkenalkan BKSAP, sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berperan sebagai penjurur (vocal point) diplomasi Parlemen. Kali ini BKSAP Day mengambil tema “BKSAP DPR RI dan Peran Strategis Diplomasi Parlemen

”

**KALAU KITA MEMANG
INGIN MENGABDI,
MAKA JADIKANLAH
POLITIK SEBUAH
PENGABDIAN BUKAN
TEMPAT MENCARI
JABATAN.**

Indonesia”.

“Biasanya BKSAP Day diselenggarakan di perguruan tinggi. Namun kami merasa penting dilakukan di tingkat SMA, karena bisa menjadi bekal untuk menentukan kemana mereka bisa berjuang untuk Indonesia. Bahwa tidak hanya dalam negeri, tetapi ada lahan luar negeri yang mereka bisa perjuangkan kepentingan nasional,” papar Nurhayati yang lulusan Fakultas Kedokteran itu.

Pada kesempatan tersebut, politisi Partai Demokrat itu menjelaskan

tantangan global telah menarik parlemen untuk aktif berpartisipasi dalam kancah hubungan internasional. Ia juga menyampaikan pentingnya peran parlemen dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah seperti menjunjung tinggi perdamaian dunia.

Hal tersebut dibuktikan dalam sidang-sidang internasional, BKSAP menunjukkan posisi solidaritas dan dukungan kepada negara-negara Muslim seperti kemerdekaan Palestina, Rohingya, dan umat muslim Uighur. DPR RI bahkan menginisiasi sejumlah draf resolusi terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar melalui forum ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dan *Asian Parliamentary Assembly* (APA).

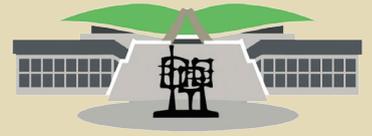
Tak hanya itu, masih kata Nurhayati, DPR RI menjadi pertama yang menginisiasi pertemuan kerja sama parlemen negara-negara pasifik untuk menguatkan diplomasi antarnegara di kawasan Pasifik. Menurutnya, Indonesia juga harus bangga karena memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai filsafat bangsa.

Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab dengan pelajar SMAN 1 Lawang. Di penghujung acara, Nurhayati selaku Ketua BKSAP memberikan motivasi kepada para pelajar, bahwa pengabdian kepada negara bisa dilakukan melalui politik dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan langsung masyarakat.

“Pertanyaannya bagus dan sangat kritis, artinya mereka mendengarkan dan ingin tahu. Setelah acara ini, saya harap banyak anak-anak bangsa yang berminat terjun ke dunia politik. Sebab, menjadi politisi kita bisa berbuat lebih banyak dan yang terpenting adalah memberikan suri ketauladanan atau *leadership by example*,” pungkas legislator dapil Jawa Timur V itu. ■ **ani/sf**



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf berfoto bersama siswa - siswi SMAN 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Foto: Anne



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama keluarga memberikan hak pilihnya di TPS 015, Kauman Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (17/4). Foto: Oji/HR



Sekjen DPR RI Indra Iskandar mendampingi delegasi parlemen dunia dan organisasi internasional dalam rangka observasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia secara serentak di Jakarta, Rabu (17/4). Foto: Angga,Rizka/HR



Suasana Pemilihan Umum di Pantia Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 dan penyandang disabilitas di Cilandak Barat, Jakarta, Rabu (17/4). Foto: Andri/HR

